

BAB I

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini bermaksud mempelajari tentang kolaborasi pemerintahan dan hambatannya dalam konteks kebijakan konservasi. Penelitian ini membahas kebijakan konservasi dengan studi kasus pada konservasi Geopark Dieng dalam pengembangan menjadi Geopark Nasional. Penelitian difokuskan pada hambatan kolaborasi yang menyebabkan mandegnya implementasi kebijakan konservasi Geopark. Kebijakan konservasi mensyaratkan kolaborasi lintas sektor, karena melibatkan satuan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, serta lintas sektoral. Kebijakan konservasi sumber daya alam di Indonesia memerlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan satuan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini sangat penting untuk mencapai efektivitas dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam, mengingat tantangan yang kompleks, seperti deforestasi, perambahan, dan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan. Menurut beberapa penelitian yang penulis baca, sinergi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat meningkatkan efektivitas kebijakan konservasi dengan memanfaatkan pengetahuan lokal dan sumber daya yang ada. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang sering kali menghalangi implementasi kebijakan tersebut. Hambatan ini termasuk konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat, serta kurangnya komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan konservasi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-

faktor penghambat ini agar kebijakan konservasi dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hambatan-hambatan dalam kolaborasi lintas sektor dalam kebijakan konservasi serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan demi mencapai tujuan keberlanjutan. Oleh karena itu, mempelajari hambatan kolaborasi penting dengan tujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala spesifik yang menghambat pengembangan geopark, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, masalah komunikasi, dan perbedaan persepsi di antara *stakeholder*. Isu ini sangat penting untuk diteliti karena memiliki beberapa alasan yang berkaitan dengan pengembangan geopark, kolaborasi antar *stakeholder*, dan peran pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Berbagai penelitian mengidentifikasi bahwa fokus seringkali jatuh pada aspek teknis dan potensi geologi tanpa mempertimbangkan secara mendalam bagaimana peran pemerintah dapat memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak. Secara konseptual dalam penelitian ini berfokus pada teori pembangunan berkelanjutan dan partisipasi masyarakat, yang merupakan dua pilar penting dalam pengembangan geopark.

Pada kasus ini menjelaskan bahwa Geopark Dieng memiliki sumber daya yang sangat kaya akan alam dan budayanya namun, dengan adanya *gap* dengan penelitian sebelumnya dan permasalahan tersebut, Geopark Dieng menjadi contoh konkret mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan geopark di Indonesia. Kendala yang meliputi masalah komunikasi antar pemangku kepentingan atau *stakeholder*, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih

dalam pengelolaan geopark, serta kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat geopark, perlu segera diatasi. Sumber daya alam geologi yang ada di Indonesia sebagian besar hanya dieksploitasi pada aktivitas pertambangan yang dampaknya pada kerusakan ekologi. Potensi wisata ini harus dikembangkan, dilestarikan, dan dijaga supaya pariwisata yang ada akan terus berkelanjutan. Salah satu daerah yang berpotensi menjadi kawasan berkembangnya kegiatan geowisata adalah Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah. Dieng Wonosobo dinilai layak menjadi kawasan geopark kelas dunia karena kawasannya seperti laboratorium raksasa dan siap digali segala isi yang ada didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala spesifik yang menghambat pengembangan geopark, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, masalah komunikasi, dan perbedaan persepsi di antara *stakeholder*. Dengan memahami isu-isu ini, solusi yang lebih tepat dapat ditemukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan geopark.

Isu ini sangat penting untuk diteliti karena memiliki beberapa alasan yang berkaitan dengan pengembangan geopark, kolaborasi antar *stakeholder*, dan peran pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pertama, Geopark Dieng memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata yang dapat meningkatkan ekonomi lokal dan konservasi lingkungan. Dengan demikian, pengembangan geopark ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga berkontribusi pada konservasi alam dan budaya yang unik di kawasan tersebut. Kedua, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan geopark. Kendala-kendala seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, masalah

komunikasi, dan perbedaan persepsi di antara *stakeholder* seringkali menghambat kemajuan proyek pengembangan geopark. Dengan memahami isu-isu ini secara mendalam, solusi yang lebih tepat dapat dirumuskan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan geopark. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana penyatuan persepsi di antara berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan geopark. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Keempat, analisis ini relevan untuk memahami penerapan prinsip *good governance* dalam konteks pengelolaan geopark.

Berbagai penelitian mengidentifikasi bahwa fokus seringkali jatuh pada aspek teknis dan potensi geologi tanpa mempertimbangkan secara mendalam bagaimana peran pemerintah dapat memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak. Meskipun ada pemahaman tentang pentingnya kolaborasi, tidak banyak penelitian yang secara eksplisit mengkaji bagaimana pemerintah dapat menyatukan persepsi dan mendorong kolaborasi tersebut.

Secara konseptual dalam penelitian ini berfokus pada teori pembangunan berkelanjutan dan partisipasi masyarakat, yang merupakan dua pilar penting dalam pengembangan geopark. Teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap inisiatif pembangunan. Dalam konteks geopark, hal ini berarti bahwa

pengelolaan sumber daya alam dan budaya harus dilakukan dengan cara yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga melestarikan lingkungan dan memberdayakan masyarakat lokal. Keterlibatan aktif masyarakat lokal menjadi sangat krusial dalam proses ini. Masyarakat tidak hanya sebagai objek dari pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak dan peran dalam pengambilan keputusan. Dukungan dari pemerintah juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat. Dengan adanya dukungan kebijakan dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam proses pengelolaan geopark, sehingga tujuan bersama dapat tercapai.

Dalam penelitian “Analisis Kinerja Manajemen Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Silokek Dalam Pengembangan Geopark Nasional” (Amelia Denata, 2024) peneliti membahas tentang kinerja dari Manajemen Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Silokek dengan menggunakan ukuran produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang Amelia Denata (2024) lakukan adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa Kinerja Manajemen Badan Pengelola Ranah Minang Silokek belum optimal dilaksanakan. Hasil tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat kinerja yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai dan dana yang masih tidak pasti setiap tahunnya. Pada penelitian tersebut memiliki masalah

pada kinerja manajemen badan pengelola sedangkan beberapa penelitian belum banyak membahas mengenai peran kolaborasi dalam pengembangan Geopark.

Penelitian “Evaluasi Potensi Geowisata Area Dieng Sebagai Kawasan Geopark Nasional” yang ditulis oleh Muhammad Haston Samudra Wicaksono yang membahas tentang berbagai aspek potensi geowisata area Dieng untuk menjadi kawasan Geopark Nasional. Pada Penelitian tersebut beberapa hasil dari evaluasi geoheritage, geo biodiversity, dan geo culture. Menurutnya, suatu kawasan dengan aspek-aspek tersebut perlu ada untuk dinyatakan sebagai Geopark Nasional. Selain itu, keterdapatannya manajemen yang mengelola, aturan-aturan pemerintah yang mendukung, serta manajemen bencana yang baik yang berlaku di wilayah Dieng juga memperkuat kawasan ini supaya dapat dikembangkan sebagai Kawasan Geopark nasional kedepannya.

Penelitian ini juga relevan untuk memahami penerapan prinsip *good governance* dalam konteks pengelolaan geopark. *Good governance* mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara instansi pemerintah serta masyarakat, diharapkan akan terwujud pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperkuat dukungan terhadap program-program pengembangan geopark.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala spesifik yang menghambat pengembangan geopark, seperti kurangnya koordinasi

antar lembaga, masalah komunikasi, dan perbedaan persepsi di antara *stakeholder*. Dengan memahami isu-isu ini secara mendalam, solusi yang lebih tepat dapat dirumuskan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan geopark. Penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang dinamika kolaborasi antar *stakeholder* tetapi juga menawarkan strategi untuk mengatasi tantangan yang ada, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di kawasan Geopark Dieng. Secara keseluruhan, analisis terhadap kendala dalam pengelolaan pengembangan Geopark Dieng sangat penting karena dapat memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika kolaborasi antar *stakeholder* serta peran pemerintah dalam menciptakan keselarasan visi. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan geopark itu sendiri tetapi juga bagi pembangunan daerah secara keseluruhan.

Geopark merupakan konsep inovatif yang menggabungkan pelestarian warisan geologi dengan pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. UNESCO (2015) mendefinisikan geopark sebagai kawasan yang memiliki warisan geologi berharga dan dikelola melalui pendekatan yang terintegrasi, mencakup konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, konsep geopark telah diadopsi untuk melindungi kawasan-kawasan bernilai geologi tinggi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal.

Kawasan Geopark Dieng, misalnya, merupakan salah satu contoh penerapan konsep geopark di Indonesia. Dengan mengusung nilai konservasi, kawasan ini menjadi model pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas.

Landasan teori geopark tidak hanya berakar pada ilmu geologi, tetapi juga mencakup berbagai disiplin ilmu lain seperti ekologi, ekonomi, dan antropologi. Konsep geopark dirancang untuk menjawab tantangan perlindungan lingkungan sekaligus memberdayakan masyarakat secara sosial dan ekonomi.

Secara mendasar, geopark adalah kawasan geografis dengan batas-batas yang jelas yang mengandung situs-situs warisan geologi bernilai internasional, nasional, atau lokal. Menurut Zhou et al. (2015), geopark memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Konservasi

Geopark berfungsi melestarikan warisan geologi, termasuk batuan, mineral, fosil, dan formasi geologi unik yang memiliki nilai ilmiah tinggi.

2. Edukasi

Melalui program edukasi, geopark bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya geologi dan hubungannya dengan lingkungan.

3. Pembangunan Berkelanjutan Geopark mendukung pembangunan ekonomi masyarakat lokal melalui pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan promosi produk lokal.

Geopark tidak hanya memanfaatkan potensi geologi sebagai daya tarik wisata, tetapi juga mengintegrasikan keanekaragaman hayati dan budaya. Dengan demikian, geopark menjadi sebuah pendekatan holistik yang menggabungkan berbagai aspek pembangunan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam pengelolaan geopark, di antaranya:

1. Keberlanjutan

Pengelolaan geopark harus memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak lingkungan dan tetap berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

2. Kolaborasi Lintas Sektor Pengelolaan geopark melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta.

3. Partisipasi Masyarakat Masyarakat lokal merupakan aktor utama dalam keberhasilan geopark. Mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam pengelolaan kawasan.

4. Pelestarian Warisan Budaya Geopark mengintegrasikan warisan budaya lokal sebagai bagian dari pengelolaan kawasan. Hal ini mencakup pelestarian tradisi, seni, dan kearifan lokal yang memiliki nilai sejarah tinggi.

Pengelolaan geopark bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi kawasan tanpa mengorbankan nilai konservasi dan keberlanjutan. Berdasarkan panduan UNESCO (2015), terdapat tiga pilar utama dalam pengelolaan geopark, yaitu:

1. Konservasi Warisan Geologi

Situs-situs geologi yang memiliki nilai penting dilindungi melalui regulasi dan upaya pelestarian. Kawasan-kawasan ini juga dimanfaatkan untuk penelitian ilmiah guna meningkatkan pengetahuan geologi.

2. Edukasi dan Kesadaran Publik

Geopark dirancang untuk menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat umum. Program edukasi biasanya mencakup pelatihan, kunjungan wisata edukasi, dan penyediaan informasi tentang nilai geologi kawasan.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Geopark memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui pengembangan pariwisata, usaha mikro, dan pemasaran produk lokal. Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam.

Indonesia memiliki banyak geopark yang telah diakui secara nasional maupun internasional. Salah satunya adalah Geopark Dieng, yang terkenal dengan fenomena geologi seperti kawah vulkanik, danau-danau, dan dataran tinggi yang indah. Geopark ini juga memiliki nilai budaya yang tinggi, dengan tradisi dan sejarah lokal yang masih terjaga.

Dalam pengelolaannya, Geopark Dieng menghadapi beberapa tantangan, seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya geopark, keterbatasan dana, dan kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan. Oleh

karena itu, diperlukan pendekatan yang inovatif dan partisipatif untuk mengatasi hambatan tersebut.

Saat ini, penyusunan Rencana Induk Geopark atau Taman Bumi menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Kawasan Dataran Tinggi Dieng menjadi salah satu kawasan yang memiliki potensi yang sesuai untuk dikembangkan menjadi geopark. Kawasan Dataran Tinggi Dieng memiliki keunggulan dari segi *geodiversity*, *biodiversity*, serta *culture diversity*. Pengembangan tersebut didukung dengan penetapan Kawasan Dieng sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sehingga dalam pengembangannya menjadi perhatian berbagai pihak atau *stakeholder* mulai dari skala daerah hingga nasional. Dalam pengembangan Geopark Dieng ini, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat bersinergi untuk mendukung pengembangan geopark.

Geopark Dieng yang telah dirancang dengan *masterplan* untuk menjadi destinasi geopark nasional menghadapi tantangan yang signifikan dalam implementasinya. Salah satu isu utama adalah perlunya tata kelola yang efektif dan penyatuan persepsi sehingga menciptakan kolaborasi yang baik di antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Koordinasi dan kolaborasi antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara masih menunjukkan kelemahan yang menghambat kemajuan proyek secara keseluruhan.

Nama Geopark yang diusulkan adalah Geopark Dieng (terdiri atas Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara). Geopark Dieng mengangkat tema "*Plataran Kahyangan Nusantara*". Tema tersebut mengangkat Geopark Dieng

yang terbentuk akibat kegiatan vulkanis dan kehidupan masyarakat yang harmonis beriringan sejak dulu hingga saat ini. "Plataran" bermakna tempat yang dihuni di mana Dieng merupakan kawasan dataran tinggi pertama di Pulau Jawa yang dihuni, "Kahyangan" berarti tempat dewadewa dan merepresentasikan tempat yang suci karena kekayaan budaya dan candi yang lestari, sedangkan "Nusantara" bermakna laboratorium hidup yang ada sejak masa lampau, banyak kejadian yang menjadi sarana edukasi yang berguna untuk skala nasional hingga internasional.

1. Kawasan Geopark Dieng

Kawasan Geopark Dieng memiliki luas 319,36 km². Geopark Dieng berada di wilayah administrasi Kabupaten Wonosobo yang berada dalam lingkup Kecamatan Kejajar, Kecamatan Garung, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Wonosobo dan Kecamatan Mojotengah juga administrasi Kabupaten Banjarnegara yang berada dalam lingkup Kecamatan Batur, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Pagentan, dan Kecamatan Wanayasa.

2. Minat dan Alasan Menjadi Geopark Nasional

Pengusulan "Geopark Dieng" sebagai Geopark Nasional diharapkan dapat membawa Pembangunan di Dataran Tinggi Dieng secara berkelanjutan melalui konservasi, pariwisata, edukasi, dan ekonomi hijau. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengusulkan Geopark Dieng sebagai Geopark Nasional didasari pada beberapa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

1. Geopark Dieng memiliki proses dan keindahan geologi serta keunikan dimana merupakan Gunung Api Kuarter yang tumbuh di Zona Tumbukan Mikrokontinen Sunda dan Mikrokontinen Australia yang membentuk Plato menghasilkan telaga, kawah, dan panas bumi
2. Geopark Dieng memiliki nilai ekologi penting yakni sebagai Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu, serta terdapat Cagar Alam dan Taman Wisata Alam yang merupakan Kawasan Konservasi
3. Geopark Dieng berada di daerah rawan bencana yang perlu sinergi dan kolaborasi berbagai pihak serta pendekatan yang komprehensif
3. Sebagai upaya ataupun landasan perlindungan (pelestarian) terhadap warisan geologi (geosite), geoheritage, biosite, dan cultural site yang ada di Kawasan Geopark Dieng, terutama 23 geosite yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 62.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
4. Konsep Pembangunan Geopark sejalan dengan 10 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicetuskan oleh PBB.

Kawasan Geopark Dieng merupakan wilayah yang memiliki nilai penting dari segi geologi, ekologi, dan budaya, serta berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan. Kawasan ini terbentang melintasi dua wilayah administratif, yaitu Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo di Provinsi Jawa Tengah. Karena berada di dua kabupaten, pengelolaan dan

pengembangan Geopark Dieng tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu pemerintah daerah saja, melainkan memerlukan kerja sama dan kolaborasi antar pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.” Lebih lanjut, Pasal 26 ayat (2) mengatur bahwa “Kerja sama wajib dilakukan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menimbulkan dampak lintas daerah.” Dengan demikian, kebijakan pengelolaan Geopark Dieng secara normatif menuntut adanya koordinasi lintas pemerintah daerah yang solid, sistematis, dan berkelanjutan.

Sebelumnya, kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan Geopark Dieng cenderung bersifat sektoral dan tidak berkelanjutan. Belum terbentuknya kelembagaan bersama yang permanen serta minimnya koordinasi lintas wilayah menyebabkan upaya pengembangan kawasan Geopark berjalan secara terpisah-pisah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih berperan sebagai fasilitator umum, namun belum berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan teknis dan kelembagaan geopark. Di sisi lain, masing-masing kabupaten lebih menonjolkan potensi wilayahnya sendiri tanpa adanya sinergi yang kuat, yang pada akhirnya memunculkan ego sektoral dan menghambat integrasi kebijakan lintas daerah.

Meskipun belum terlembaga secara permanen, sejumlah kolaborasi telah terjadi antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam konteks pengelolaan Geopark Dieng. Kolaborasi ini terlihat, misalnya, dalam proses pengajuan status Geopark Nasional dan UNESCO Global Geopark, yang menuntut kerja sama dalam penyusunan data dan batas wilayah antar kabupaten. Kolaborasi lainnya tampak pada penyelenggaraan Dieng Culture Festival, pelatihan geopark, serta forum-forum perencanaan seperti penyusunan rencana aksi pengelolaan Geopark.

Namun demikian, bentuk kolaborasi tersebut masih bersifat sektoral dan insidental, serta belum ditopang oleh kelembagaan formal yang mampu memastikan koordinasi lintas daerah secara berkelanjutan. Berbagai hambatan kolaborasi, seperti perbedaan prioritas pembangunan antar daerah, minimnya kelembagaan bersama yang mengatur pengelolaan Geopark, lemahnya komunikasi lintas sektoral, serta belum adanya pembagian peran yang jelas antara pihak-pihak terkait, menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan Geopark Dieng. Padahal, keberhasilan pengelolaan kawasan ini sangat ditentukan oleh efektivitas koordinasi dan keselarasan visi antar pemerintah daerah yang terlibat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis secara mendalam mengenai hambatan-hambatan yang muncul dalam kolaborasi antarpemerintah daerah pada implementasi kebijakan Geopark Dieng, agar dapat dirumuskan solusi yang tepat demi keberlanjutan pengembangan kawasan tersebut.

Geopark Dieng memiliki sumber daya yang sangat kaya akan alam dan budayanya dengan adanya *gap* dengan penelitian sebelumnya dan permasalahan tersebut, Geopark Dieng menjadi contoh konkret mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan geopark di Indonesia. Kendala yang meliputi masalah komunikasi antar pemangku kepentingan atau *stakeholder*, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan geopark, serta kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat geopark, perlu segera diatasi. Berdasarkan masalah tersebut, menjadi landasan utama peneliti dalam melakukan penelitian “Analisis Hambatan Kolaborasi Pemerintah pada Implementasi Kebijakan Geopark Dieng”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kolaborasi pemerintah dalam kebijakan konservasi Geopark Dieng?
2. Apa saja hambatan kolaborasi yang dihadapi dan implikasinya terhadap efektivitas kebijakan konservasi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mengetahui kolaborasi pemerintah dalam kebijakan konservasi.
2. Menganalisis dan mengetahui hambatan kolaborasi yang dihadapi.
3. Menganalisis dan mengetahui implikasinya terhadap efektivitas kebijakan konservasi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan baru mengenai manajemen Geopark Dieng, khususnya dalam hal kolaborasi antara pemerintah dan *stakeholder*.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan teori-teori terkait kolaborasi antara *stakeholder* dalam pengembangan Geopark Dieng.
3. Memberikan dasar dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang tata kelola geopark di wilayah yang memiliki potensi serupa.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dengan memberikan wawasan tentang kendala yang dihadapi dalam pengelolaan geopark, membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif, dan meningkatkan koordinasi antara *stakeholder* untuk mencapai pengembangan geopark.

2. Bagi Pengelola Geopark Dieng

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengelola mengidentifikasi kendala dalam manajemen geopark dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan geopark.

3. Bagi Sektor Swasta dan Investor

Memberikan potensi kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dan pengelola geopark untuk pengembangan usaha yang berkelanjutan serta memberikan peluang bisnis yang ditimbulkan dari pengembangan geopark.

1.5. Penelitian Terdahulu

Dalam beberapa penelitian berupa jurnal yang telah penulis baca, mayoritas dari penelitian tersebut adalah membahas tentang kolaborasi dalam pembangunan pariwisata dan geopark di beberapa daerah. Terdapat kesamaan di mana fokus kolaborasi menjadi strategi utama seperti pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, dalam pengelolaan geopark. Sebagian besar jurnal juga menggunakan pendekatan kualitatif dan jurnal-jurnal yang telah penulis baca memberikan rekomendasi mengenai hambatan implementasi kebijakan geopark.

Pada jurnal *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Geopark Silokek di Kabupaten Sijunjung* (Gustia Ningsih D., dkk., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan Geopark Silokek di Kabupaten Sijunjung. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive untuk memastikan data yang relevan dan mendalam terkait kolaborasi di kawasan ini. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan pembentukan kelompok sadar wisata yang berperan penting dalam mengelola pariwisata di Geopark Silokek. Selain itu, kawasan ini mencatat peningkatan kunjungan wisatawan secara signifikan, sekaligus menerima berbagai penghargaan nasional. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan keterbatasan dalam keterlibatan masyarakat, khususnya dalam pengambilan keputusan kebijakan pariwisata. Kelompok sadar wisata yang terbentuk memerlukan dukungan lebih lanjut untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan dalam pengelolaan. Di sisi lain, studi ini menyoroti kurangnya

penelitian sebelumnya mengenai aspek tata kelola kolaboratif di kawasan geopark. Hal ini mencerminkan adanya peluang untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang efektivitas kolaborasi, tetapi juga menekankan perlunya peningkatan dukungan dan sinergi antar pemangku kepentingan.

Pada jurnal “Peran dan Kolaborasi *Stakeholder* Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisata di Kawasan Danau Toba” (Sitorus,2020) studi ini berfokus pada analisis peran dan kolaborasi *stakeholder* dalam mendukung pariwisata di Kawasan Danau Toba. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan wawancara mendalam terhadap informan utama yang dipilih secara purposive. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kawasan ini memiliki potensi besar, pemangku kepentingan belum memaksimalkan peran mereka dalam pengembangan pariwisata. Kabupaten Samosir, salah satu bagian dari Danau Toba, mencatat jumlah kunjungan wisatawan asing tertinggi. Namun, kolaborasi antar pemangku kepentingan di kawasan ini masih belum optimal. Pola pikir masyarakat lokal mulai beralih ke arah mendukung sektor pariwisata, didorong oleh inisiatif pemerintah seperti pelatihan dan pengelolaan pariwisata lokal. Tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dan pemahaman terbatas tentang potensi pariwisata oleh pemangku kepentingan. Studi ini juga mengidentifikasi perlunya pendekatan yang lebih sistematis untuk mengintegrasikan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Dengan peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan, kawasan ini memiliki peluang

besar untuk menjadi destinasi wisata unggulan. Hasil penelitian ini memberikan dasar bagi rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi di kawasan Danau Toba.

Pada jurnal dengan judul “Kolaborasi Antar *Stakeholder* dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi)” (Fairuza M., 2017). Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat mendukung pembangunan inklusif di sektor pariwisata Pulau Merah, Banyuwangi. Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi di Pulau Merah memberikan hasil positif, termasuk distribusi manfaat ekonomi yang merata kepada masyarakat lokal. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan juga cukup tinggi, mencerminkan integrasi yang baik antara pariwisata dan keberlanjutan. Namun, penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama, termasuk kurangnya perhatian terhadap dampak jangka panjang dari kolaborasi. Strategi resolusi konflik antara pemangku kepentingan juga tidak dieksplorasi secara menyeluruh, meskipun konflik tersebut memengaruhi efektivitas kolaborasi. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan atau dinamika pasar wisata belum diperhatikan secara mendalam. Studi ini menyarankan perlunya analisis yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan pariwisata di Pulau Merah. Dengan pendekatan yang lebih integratif, kolaborasi di kawasan ini berpotensi menjadi model untuk

pengelolaan pariwisata inklusif di daerah lain. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan inovasi dalam pengembangan pariwisata lokal.

Pada jurnal yang berjudul “Strategi Pengembangan Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong Menuju Global UNESCO di Kabupaten Kebumen” (Setyowati R., dkk., 2024) Penelitian ini mengevaluasi strategi pengembangan Geopark Karangsambung-Karangbolong dengan tujuan mencapai status UNESCO Global Geopark. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan triangulasi data untuk memastikan validitas temuan. Strategi yang diterapkan di kawasan ini sebagian besar berhasil, seperti perluasan wilayah pengembangan menjadi 22 kecamatan untuk mendukung keberlanjutan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga menjadi hasil yang signifikan dari pengembangan geopark ini. Selain itu, berbagai inisiatif konservasi, seperti reboisasi dan perlindungan spesies endemik, telah dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekologi. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya pendidikan tentang geopark di masyarakat serta keterbatasan dalam penyebaran informasi. Studi ini juga menunjukkan perlunya keterlibatan masyarakat yang lebih intens dalam strategi pengembangan. Analisis terhadap efektivitas strategi yang telah diterapkan masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Dengan perbaikan di area ini, Geopark Kebumen memiliki potensi besar untuk mencapai pengakuan UNESCO. Temuan ini memberikan wawasan penting untuk pengembangan geopark sebagai model keberlanjutan pariwisata.

Kolaborasi Pengembangan Kawasan Geopark dalam Mewujudkan Destinasi Pariwisata Berkelas Dunia di Provinsi Jawa Barat (Putri S, 2019) Penelitian ini

mengkaji kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan Geopark Ciletuh menuju status pariwisata kelas dunia. Studi literatur menjadi metode utama untuk mengumpulkan data, dengan sumber dari dokumen, buku, jurnal, serta situs web. Hasil penelitian menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, departemen pariwisata, dan masyarakat lokal dalam pengembangan kawasan ini. Pembangunan berkelanjutan menjadi fokus utama, mencakup peningkatan infrastruktur dan penguatan kebijakan tata kelola. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengembangan pariwisata. Desain kelembagaan yang ada cenderung membatasi peran *stakeholder* tertentu, menghambat efektivitas kolaborasi. Selain itu, tata kelola yang profesional di kawasan geopark masih perlu ditingkatkan untuk mencapai standar global. Penelitian ini mengidentifikasi perlunya langkah kebijakan yang inovatif untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan pengelolaan yang lebih baik, Geopark Ciletuh memiliki potensi untuk menjadi destinasi kelas dunia yang berkelanjutan. Hasil studi ini memberikan dasar untuk pengembangan geopark lain di Indonesia.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Kolaborasi Kebijakan

Menurut Ansell dan Gash (2008), kolaborasi kebijakan adalah proses di mana berbagai pemangku kepentingan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi kebijakan merupakan proses interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai

tujuan bersama melalui dialog, kepercayaan, dan komitmen. Dalam konteks ini, elemen-elemen seperti dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama menjadi kunci untuk membangun kerja sama yang efektif. Keberhasilan kolaborasi kebijakan tidak hanya bergantung pada adanya kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara kolaboratif oleh semua pihak yang terlibat.

Analisis *stakeholder* adalah proses identifikasi, pemetaan, dan pemahaman terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kebijakan atau proyek, serta kepentingan, kekuatan, dan pengaruh mereka terhadap proses tersebut (Freeman, 1984). Dalam konteks kebijakan Geopark Dieng, analisis ini penting untuk memahami dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan dan hambatan yang mungkin muncul. *Stakeholder* dalam implementasi kebijakan Geopark Dieng antara lain : Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat lokal, akademisi dan peneliti, dan sektor swasta. Hambatan kolaborasi yang dihadapi dapat diidentifikasi melalui analisis *stakeholder*. Setiap *stakeholder* memiliki kepentingan yang berbeda sehingga dapat menyebabkan konflik. Jika ada sejarah konflik atau ketidakpuasan sebelumnya, kepercayaan antar *stakeholder* bisa berkurang, menghambat dialog yang konstruktif. Hambatan dalam komunikasi juga dapat muncul dari perbedaan bahasa, terminologi, atau cara penyampaian informasi yang tidak jelas.

Pada konsep kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2008) memiliki beberapa variabel :

1) *Starting Conditions* (Kondisi Awal)

Pada variabel ini merujuk pada kondisi sebelum ada proses kolaborasi dimulai. Variabel ini memiliki indikator-indikator seperti :

- a. Tingkat kepercayaan awal : Tingkat kepercayaan awal merujuk pada sejauh mana para pihak yang terlibat dalam kolaborasi saling mempercayai satu sama lain sebelum proses kolaborasi dimulai. Jika tingkat kepercayaan tinggi, kolaborasi cenderung berjalan lebih lancar, komunikasi lebih terbuka, dan partisipasi lebih aktif. Sebaliknya, jika kepercayaan rendah, dapat timbul kecurigaan, ketidakpastian, dan resistensi yang dapat menghambat kolaborasi.
- b. Sejarah konflik atau kerja sama : Jika ada riwayat konflik, hal ini dapat menciptakan ketegangan dan rasa tidak nyaman, yang mungkin menghalangi partisipasi. Di sisi lain, jika ada sejarah kerja sama yang positif, hal ini dapat membangun fondasi yang kuat untuk kolaborasi yang efektif dan produktif.
- c. Ketidakseimbangan sumber daya dan kekuasaan : Ketidakseimbangan dalam sumber daya (seperti dana, informasi, atau keahlian) dan kekuasaan (seperti pengaruh atau keputusan) dapat mempengaruhi dinamika kolaborasi. Jika satu

pihak memiliki sumber daya atau kekuasaan yang jauh lebih besar daripada yang lain, hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dan menghambat partisipasi aktif dari pihak yang lebih lemah.

- d. Insentif atau hambatan untuk partisipasi : Insentif dapat berupa manfaat yang jelas, seperti peningkatan reputasi, akses ke sumber daya, atau peluang untuk belajar. Sebaliknya, hambatan bisa berupa kekhawatiran tentang waktu yang dibutuhkan, potensi risiko, atau ketidakjelasan tentang tujuan kolaborasi.

2) *Institutional Design* (Desain Institusi)

Pada variabel kedua ini berkaitan dengan aturan dan struktur yang mendasari proses kolaborasi. Desain institusi yang baik memastikan proses berjalan inklusif, adil, dan transparan. Variabel ini memiliki indikator seperti :

- a. Inklusivitas partisipan : Inklusivitas memastikan bahwa semua pihak yang relevan, termasuk yang sering kali kurang terwakili, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Hal ini mencakup keterlibatan komunitas lokal, sektor swasta, pemerintah, akademisi, dan pihak lain yang terkena dampak kebijakan.
- b. Aturan dasar yang jelas : Aturan dasar berfungsi sebagai panduan tentang bagaimana proses kolaborasi akan dijalankan. Aturan ini mencakup prosedur pengambilan keputusan,

pembagian peran, mekanisme penyelesaian konflik, serta ekspektasi terhadap partisipasi.

- c. **Transparansi proses** : Transparansi berarti semua pihak memiliki akses yang adil terhadap informasi yang relevan, dan seluruh keputusan serta tindakan diambil secara terbuka. Ini membantu menghindari kecurigaan terhadap manipulasi atau dominasi pihak tertentu.
- d. **Struktur formal kolaborasi** : Struktur formal memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk proses kolaborasi. Ini dapat berupa pembentukan badan pengelola, komite, atau forum yang bertanggung jawab untuk memimpin, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya kolaborasi.

3) *Leadership* (Kepemimpinan)

Leadership (Kepemimpinan) adalah elemen kunci dalam proses kolaborasi. Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab untuk mengarahkan proses tetapi juga memastikan semua pihak tetap terlibat, memfasilitasi komunikasi, dan membangun hubungan saling percaya. Pada variabel ini memiliki indikator seperti :

- a. **Kemampuan mediasi dan fasilitasi** : Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjadi mediator netral yang mampu meminimalkan konflik dan fasilitator yang efektif untuk menjaga dialog tetap produktif.

- b. Pemberdayaan pihak yang lemah : Pada konteks ini pemimpin harus memastikan pihak yang kurang berdaya dalam kolaborasi (karena kekurangan sumber daya, akses, atau pengetahuan) dapat berpartisipasi secara bermakna.
- c. Pembangunan kepercayaan antar pemangku kepentingan : Pembangunan kepercayaan adalah proses menciptakan rasa saling percaya di antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi.
- d. Keberlanjutan dialog : Keberlanjutan dialog adalah proses memastikan komunikasi yang terus-menerus di antara para pemangku kepentingan dalam kolaborasi, bahkan setelah keputusan awal diambil. Dialog yang berkelanjutan penting untuk mengatasi tantangan baru, menjaga komitmen para pihak, dan memperbaiki proses kebijakan.

4) *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi)

Proses kolaborasi adalah di mana *stakeholder* berinteraksi secara langsung untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan proses ini bergantung pada bagaimana dialog dijalankan, kepercayaan dibangun, komitmen diperkuat, dan pemahaman bersama diciptakan. Pada variabel ini memiliki indikator seperti :

- a. Dialog langsung dan tatap muka : Memberikan kesempatan bagi *stakeholder* untuk berkomunikasi secara mendalam dan menyampaikan ide atau kekhawatiran mereka. Pertemuan tatap

muka sering kali lebih efektif untuk memahami sudut pandang pihak lain dibandingkan dengan komunikasi tidak langsung.

- b. Pembangunan kepercayaan : Kepercayaan adalah elemen kunci untuk menciptakan hubungan kerja yang efektif. Proses kolaborasi harus mencakup langkah-langkah untuk membangun dan memelihara kepercayaan antar pemangku kepentingan.
- c. Komitmen pada proses : Ini berarti bahwa semua pihak berpartisipasi secara aktif dan konsisten dalam kolaborasi. Komitmen ini melibatkan kesediaan untuk tetap terlibat meskipun terdapat tantangan atau konflik.
- d. Pemahaman bersama terhadap tujuan dan masalah : Hasil dari dialog yang intens dan konstruktif, di mana semua pihak sepakat tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana masalah utama harus diatasi.

5) *Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara)

Intermediate outcomes (hasil sementara) adalah pencapaian-pencapaian awal yang muncul selama proses kolaborasi berlangsung. Hasil-hasil ini tidak hanya menjadi indikasi bahwa kolaborasi berjalan sesuai tujuan tetapi juga membantu membangun momentum dan memperkuat komitmen para pemangku kepentingan. Variabel ini memiliki indikator seperti :

- a. "*Small wins*" atau kemenangan kecil yang memperkuat kepercayaan : Pencapaian-pencapaian awal yang kecil namun

berdampak positif dalam proses kolaborasi. Meskipun skalanya kecil, keberhasilan ini memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan, memperkuat komitmen, dan memotivasi semua pihak untuk terus berkolaborasi.

- b. Hasil temuan bersama : Data atau informasi yang dikumpulkan secara kolaboratif oleh para pemangku kepentingan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang fakta dan kondisi yang relevan dengan masalah atau tujuan kolaborasi.
- c. Perencanaan strategis bersama : proses penyusunan rencana jangka pendek, menengah, atau panjang yang disusun secara kolaboratif oleh semua pemangku kepentingan. Rencana ini dirancang untuk mencapai tujuan bersama dengan mempertimbangkan kebutuhan, sumber daya, dan prioritas masing-masing pihak.

1.6.2. Geopark sebagai Area Kebijakan Kolaboratif

Geopark adalah kawasan dengan warisan geologi yang signifikan yang dikelola untuk tujuan pendidikan, penelitian, serta pengembangan ekonomi berbasis pariwisata berkelanjutan. Pengelolaan geopark membutuhkan kebijakan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, pelaku usaha wisata, akademisi, dan organisasi non-pemerintah

(NGO). Menurut teori *stakeholder* yang dikemukakan oleh Freeman (1984), keterlibatan seluruh pihak ini penting untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian alam dan pengembangan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan, masyarakat lokal sebagai pelaku utama, pelaku usaha wisata mendukung pembangunan ekonomi melalui ekowisata, sementara akademisi dan NGO memberikan kontribusi berupa kajian ilmiah serta advokasi terhadap keberlanjutan kawasan.

Kebijakan kolaboratif ini sejalan dengan prinsip *sustainable development* yang diperkenalkan dalam Brundtland Report (1987), yang menekankan perlunya melestarikan warisan alam sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Melalui pendekatan ini, sumber daya dapat dikelola secara efektif dengan menggabungkan keterampilan, dana, dan fasilitas dari berbagai pihak, sebagaimana ditegaskan oleh Elinor Ostrom (1990) dalam pengelolaan sumber daya bersama. Namun, pengelolaan geopark juga menghadapi tantangan, seperti ketidakseimbangan kekuasaan, keterbatasan sumber daya, serta konflik antara kebutuhan konservasi dan pengembangan ekonomi. Freeman mencatat bahwa pihak dengan pengaruh lebih besar sering kali mendominasi pengambilan keputusan, sehingga masyarakat lokal yang terdampak langsung sering kali tidak mendapatkan manfaat yang setara.

Selain itu, keterbatasan dana dan tenaga kerja juga dapat menjadi hambatan, sebagaimana diuraikan dalam teori *triple bottom line* oleh Elkington (1997). Konflik antara pelestarian lingkungan dan pengembangan pariwisata juga memerlukan kebijakan bijak yang mengutamakan keseimbangan, sesuai dengan pandangan Hardin (1968) dalam konsep *tragedy of the commons*. Oleh karena itu, kebijakan berbasis data ilmiah menjadi kunci keberhasilan pengelolaan geopark. Pendekatan ini, sebagaimana diungkapkan oleh Stewart (2006), memastikan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan legitimasi kebijakan yang lebih kuat. Dalam konteks Geopark Dieng, kolaborasi ini dapat mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan, melindungi warisan geologi dan ekologi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pariwisata yang berkelanjutan.

1.6.3. Analisis Stakeholder dalam Kebijakan

Studi yang pertama kali mengemukakan mengenai *stakeholder* adalah *Strategic Management: A Stakeholder Approach* oleh Freeman pada tahun 1984. Sejak saat itu banyak sekali studi yang membahas mengenai *stakeholder*. Menurut dia (Freeman, 1984), asumsi utama dari teori *stakeholder* adalah bahwa efektivitas organisasi diukur dengan kemampuannya untuk memuaskan tidak hanya para pemegang saham, tetapi juga para agen yang memiliki saham organisasi (Freeman, 1984). Menurut Freeman dalam teori *stakeholder* adalah seperti sebuah kelompok atau individual yang dapat memberi dampak atau terkena

dampak oleh hasil dari tujuan perusahaan. Yang termasuk dalam *stakeholder* yaitu *stakeholder*, *creditor*, *employess*, *supplier*, *public interest grup*, dan *goverment bodies*.

1) *Stakeholder* Primer

Stakeholder primer merupakan *stakeholder* yang memiliki hubungan langsung dengan organisasi atau proyek dan sangat bergantung pada keberhasilan atau kegagalannya. Mereka adalah pihak yang kepentingannya paling utama dalam pengambilan keputusan. *Stakeholder* primer adalah individu atau kelompok yang memiliki peran krusial dalam kelangsungan hidup perusahaan. Tanpa partisipasi mereka, perusahaan tidak dapat bertahan.

- a. Keterlibatan Langsung : *Stakeholder* primer memiliki hubungan langsung dan esensial dengan operasi organisasi, proyek, atau kebijakan. Mereka memainkan peran penting dalam kegiatan sehari-hari yang menjadi inti dari keberlangsungan perusahaan atau program. *Stakeholder* ini adalah individu atau kelompok yang langsung terlibat dalam transaksi atau aktivitas utama, seperti memproduksi barang, menyediakan jasa, atau memastikan kelancaran rantai pasokan.

- b. Dampak Signifikan : Keputusan, tindakan, atau respons *stakeholder* primer memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja, stabilitas, dan keberlanjutan perusahaan atau proyek.
- c. Kepentingan Bersama : *Stakeholder* primer memiliki tujuan dan kepentingan yang langsung terkait dengan keberhasilan organisasi, sehingga keberhasilan organisasi sering kali menjadi keberhasilan mereka juga.

2) *Stakeholder* Sekunder

Stakeholder sekunder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang tidak secara langsung terlibat dalam aktivitas inti atau operasional perusahaan, proyek, atau kebijakan, tetapi tetap memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap keberhasilannya. Mereka sering bertindak sebagai pendukung, pengawas, atau mediator, serta memengaruhi kebijakan atau opini publik secara tidak langsung.

- a. Kepentingan Tidak Langsung : *Stakeholder* sekunder memiliki kepentingan yang bersifat tidak langsung terhadap organisasi atau proyek. Mereka tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas inti, tetapi hasil atau dampaknya tetap relevan bagi mereka. Kepentingan *stakeholder* sekunder sering kali berkaitan dengan isu-isu yang lebih luas, seperti reputasi, keberlanjutan, atau pengaruh sosial.

- b. Pengaruh Terhadap Kebijakan : *Stakeholder* sekunder memiliki kapasitas untuk memengaruhi kebijakan melalui opini publik, tekanan sosial, atau saran teknis, meskipun mereka tidak memiliki kewenangan langsung. Pengaruh mereka dapat memengaruhi legitimasi dan penerimaan kebijakan di tingkat publik.
- c. Peran Sebagai Fasilitator : *Stakeholder* sekunder sering kali berfungsi sebagai penghubung atau fasilitator antara organisasi dan pihak-pihak lain, baik dengan *stakeholder* primer maupun masyarakat luas melalui mediasi, penyebaran informasi, atau advokasi.

3) *Stakeholder* Kunci

Stakeholder Kunci adalah pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan suatu kebijakan, proyek, atau organisasi. Menurut teori *stakeholder* Freeman, *stakeholder* kunci adalah aktor strategis yang perannya sangat penting, baik karena kewenangan formal, pengaruh strategis, maupun posisi mereka yang krusial dalam sistem.

- a. Kewenangan Legal : *Stakeholder* kunci memiliki kewenangan formal atau legal untuk membuat keputusan, mengatur, atau mengesahkan kebijakan yang berhubungan langsung dengan organisasi atau proyek. Mereka memegang otoritas hukum

yang memungkinkan mereka untuk memengaruhi arah kebijakan atau implementasi proyek.

- b. Pengaruh Strategis : *Stakeholder* kunci memiliki kapasitas untuk memengaruhi strategi, prioritas, dan keberhasilan suatu kebijakan atau proyek, meskipun mereka mungkin tidak memiliki kewenangan legal. Pengaruh strategis mereka berasal dari kemampuan untuk memobilisasi sumber daya, menciptakan aliansi, atau menentukan arah kebijakan.
- c. Posisi Penting : *Stakeholder* kunci menempati posisi sentral dalam jaringan pemangku kepentingan, sehingga mereka menjadi penghubung antara berbagai kelompok dan mampu memengaruhi dinamika hubungan antar-*stakeholder*. Karena posisinya yang penting, *stakeholder* ini dapat memengaruhi sinergi antara *stakeholder* primer dan sekunder serta mendorong keberhasilan kebijakan.

1.6.4. Analisis *Stakeholder* dari Sudut Pandang Kekuasaan dan Kepentingan

Menurut Freeman (1984) dalam teori *stakeholder*, kekuasaan dan kepentingan merupakan dimensi penting untuk memahami bagaimana *stakeholder* memengaruhi atau dipengaruhi oleh tujuan organisasi. Pendekatan ini diperkuat oleh teori dari Mitchell, Agle, dan Wood (1997) yang mengembangkan model *Stakeholder Salience* berdasarkan tiga variabel utama:

1. Kekuasaan (*Power*)

Kekuasaan pada konteks ini adalah kemampuan *stakeholder* untuk memengaruhi arah kebijakan, keputusan, atau keberhasilan suatu proyek. Kekuasaan ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti otoritas hukum, kemampuan finansial, pengaruh sosial, atau kekuatan politik. Misalnya, pemerintah memiliki kekuasaan melalui regulasi, sementara investor memengaruhi melalui pendanaan. Di sisi lain, kelompok masyarakat atau organisasi sosial dapat memengaruhi opini publik untuk menekan pihak terkait. Kekuasaan *stakeholder* bersifat dinamis dan berubah-ubah tergantung situasi. Oleh karena itu, organisasi perlu memantau siapa yang memiliki pengaruh besar dalam konteks tertentu agar dapat menyesuaikan pendekatannya.

2. Kepentingan (*Interest*)

Kepentingan adalah seberapa besar perhatian atau keterlibatan *stakeholder* terhadap proyek atau kebijakan tertentu. Kepentingan ini bisa langsung, seperti masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan pembangunan, atau tidak langsung, seperti lembaga yang peduli pada isu lingkungan secara umum. Tingkat kepentingan ini biasanya dipengaruhi oleh harapan, nilai, atau manfaat yang dirasakan oleh *stakeholder*. Dengan memahami apa yang penting bagi masing-masing pihak, organisasi dapat menentukan langkah

yang tepat untuk melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

3. Urgensi (*Urgency*)

Urgensi menggambarkan seberapa mendesak tuntutan atau kebutuhan *stakeholder* bagi organisasi untuk segera merespons. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor utama: waktu dan pentingnya masalah. Tuntutan yang membutuhkan tanggapan cepat, seperti ancaman kerusakan lingkungan, memiliki urgensi lebih tinggi. Selain itu, isu-isu yang dianggap kritis, seperti pelanggaran hak atau risiko besar bagi organisasi, juga dianggap sangat mendesak. *Stakeholder* yang memiliki urgensi tinggi sering kali memaksa organisasi untuk mengambil langkah cepat, bahkan jika mereka tidak memiliki kekuasaan atau kepentingan besar.

Pendekatan ini sering diimplementasikan dalam bentuk *Stakeholder Power-Interest Grid* (Eden & Ackermann, 1998), yang membagi *stakeholder* ke dalam empat kategori :

1) *Keep Satisfied* (Kekuasaan Tinggi, Kepentingan Rendah)

Stakeholder dengan kekuasaan besar tetapi kepentingan rendah perlu dijaga agar tetap mendukung proyek tanpa memberikan hambatan. Dalam konteks Geopark Dieng, salah satu contohnya adalah investor besar atau pemilik modal yang mendanai infrastruktur pendukung seperti akses jalan atau fasilitas wisata. Meskipun mereka tidak secara langsung terlibat dalam operasional geopark, kebutuhan dan ekspektasi mereka harus dipenuhi agar

mereka tetap mendukung tanpa memengaruhi kebijakan inti. Komunikasi rutin tentang perkembangan proyek dapat menjaga hubungan baik dengan mereka.

2) *Key Players* (Kekuasaan Tinggi, Kepentingan Tinggi)

Stakeholder dengan pengaruh besar dan kepentingan tinggi harus dilibatkan secara intensif karena mereka berperan penting dalam keberhasilan pengelolaan geopark. Dalam Geopark Dieng, pemerintah daerah termasuk dalam kategori ini. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan zonasi, mengelola sumber daya, dan memberikan izin operasional. Selain itu, mereka juga memiliki kepentingan dalam keberhasilan proyek karena dampaknya terhadap pendapatan daerah dan citra pariwisata. Pemerintah daerah perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis untuk memastikan pengelolaan geopark sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah.

3) *Keep Informed* (Kekuasaan Rendah, Kepentingan Tinggi)

Stakeholder yang memiliki kepentingan besar tetapi kekuasaan rendah memerlukan perhatian dalam bentuk komunikasi dan pemberian informasi yang memadai. Dalam pengelolaan Geopark Dieng, masyarakat lokal adalah contoh yang relevan. Mereka memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan geopark karena terlibat dalam pariwisata berkelanjutan, seperti menjadi pemandu wisata, menyediakan homestay, atau menjual produk lokal. Meskipun pengaruh mereka terhadap kebijakan relatif kecil, keterlibatan mereka dalam bentuk pelatihan, konsultasi, dan

pemberian informasi secara teratur akan memastikan dukungan dan partisipasi aktif mereka dalam pengelolaan geopark.

4) *Minimal Effort* (Kekuasaan Rendah, Kepentingan Rendah)

Stakeholder dengan pengaruh kecil dan sedikit kepentingan perlu dipantau untuk memastikan mereka tidak menimbulkan gangguan yang signifikan. Di Geopark Dieng, kelompok masyarakat umum yang tidak secara langsung terdampak oleh geopark, seperti penduduk di luar kawasan inti geopark, dapat termasuk dalam kategori ini. Meski mereka tidak terlibat langsung, tetap penting untuk memantau opini mereka karena potensi dampak sosial atau lingkungan dapat memicu isu yang lebih besar. Penyebaran informasi umum dan edukasi tentang manfaat geopark bagi daerah dapat membantu menjaga hubungan positif dengan kelompok ini.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan lanjutan dari kerangka teori untuk memperjelas hal-hal yang terkait indikator dari konsep utama secara operasional. Pada penelitian ini merangkum hubungan antara teori, fenomena, dan pendekatan penelitian. Penelitian ini didasarkan pada teori kolaborasi kebijakan (Ansell dan Gash, 2008), yang menekankan pentingnya dialog, kepercayaan, dan komitmen antar pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Geopark Dieng, kolaborasi lintas sektor menjadi fokus utama karena melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan pihak swasta. Fenomena yang diangkat adalah kendala dalam pengembangan geopark yang meliputi kurangnya koordinasi antar instansi, perbedaan persepsi *stakeholder*, serta keterbatasan sumber daya manusia.

Konsep	Definisi	Dimensi Konsep
<i>Collaborative Governance</i>	<i>Collaborative governance</i> merupakan proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam suatu forum bersama yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan	a. <i>Starting Conditions</i> : :kondisi awal yang mempengaruhi terbentuknya kolaborasi, seperti ketimpangan sumber daya, sejarah konflik, serta motivasi stakeholder untuk berpartisipasi. b. <i>Institutional Design</i> : desain kelembagaan yang mengatur proses kolaborasi, meliputi aturan main, keterbukaan

	<p>deliberatif untuk mencapai tujuan bersama dalam penyelesaian masalah publik (Ansell & Gash, 2008).</p>	<p>partisipasi, dan mekanisme koordinasi antar aktor.</p> <p>c. <i>Facilitative Leadership</i> : kepemimpinan yang mampu memfasilitasi proses kolaborasi, termasuk kemampuan memediasi konflik, membangun komunikasi, dan mendorong partisipasi stakeholder.</p> <p>d. <i>Collaborative Process</i> : proses interaksi antar stakeholder yang meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses kolaborasi, serta terciptanya pemahaman bersama dalam mencapai tujuan kebijakan.</p>
<p><i>Stakeholder Saliience</i></p>	<p><i>Stakeholder saliience</i> merupakan konsep yang menjelaskan tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder dalam suatu proses pengambilan keputusan berdasarkan atribut kekuasaan, kepentingan, dan urgensi yang dimiliki oleh stakeholder</p>	<p>a. <i>Power (Kekuasaan)</i> : kemampuan stakeholder untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan dalam implementasi kebijakan melalui penguasaan sumber daya, kewenangan, maupun pengaruh politik.</p> <p>b. <i>Kepentingan (Interest)</i>: tingkat pengakuan terhadap peran stakeholder dalam suatu sistem atau kebijakan berdasarkan</p>

	tersebut (Mitchell, Agle, & Wood).	<p>norma, nilai, maupun aturan formal yang berlaku.</p> <p>c. Urgency (<i>Urgensi</i>) : tingkat kepentingan dan tuntutan stakeholder terhadap suatu isu atau kebijakan yang memerlukan perhatian segera dalam proses pengambilan keputusan.</p>
--	------------------------------------	--

1.8. Kerangka Berpikir



Penelitian ini akan membahas bagaimana kebijakan Geopark Dieng yang ada di antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara terimplementasi dengan baik, terutama pada aspek kolaborasi antara dua kabupaten. Dari konsep tersebut, terdapat beberapa variabel. Dalam variable tentunya memiliki indikator untuk membangunnya.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena atau kejadian dengan cara pengumpulan dan analisis data deskriptif. Pada penelitian ini menggambarkan situasi sosial tertentu berdasarkan subjek dan objek penelitian secara holistik. Semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian akan tergambarkan setelah melalui analisis dan dibandingkan dengan keadaan sebenarnya. Sehingga dapat memberikan informasi bermanfaat bagi ilmu pengetahuan serta dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran besar dan pemahaman yang mendalam pada topik yang peneliti ambil.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk memahami dinamika dan kompleksitas Geopark Dieng sebagai unit analisis. Pendekatan ini sangat relevan karena fokus penelitian terletak pada satu lokasi khusus yang memiliki potensi geologis, ekologi, dan keterlibatan pemangku kepentingan

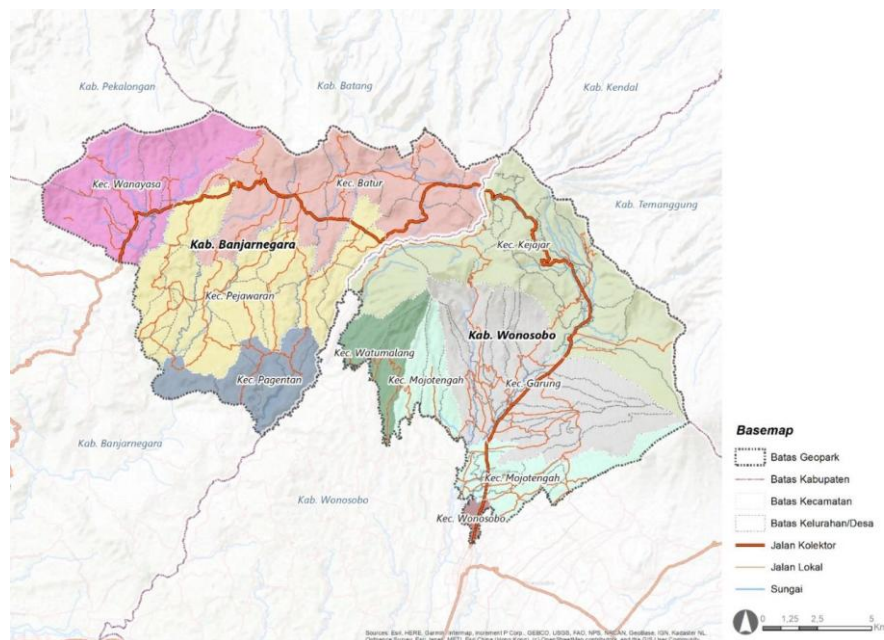
yang berbeda. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat dari berbagai sudut pandang, seperti pemerintah, masyarakat lokal, dan pengelola geopark. Metode ini dapat digunakan untuk meneliti komponen yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan di Geopark Dieng.

Selain itu, penelitian deskriptif ini memungkinkan untuk menyelidiki hubungan antara kebijakan konservasi dan kolaborasi pemerintah, serta bagaimana keduanya berdampak pada pemberdayaan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang konteks yang lebih luas, yang mencakup dinamika sosial, hambatan struktural, dan solusi potensial untuk pengelolaan Geopark Dieng.

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi atau temoat di mana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini akan dilakukan di Geopark Dieng, yang berada di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo, Jawa Tengah. Kawasan ini memiliki nilai geologis, ekologis, dan budaya yang signifikan, dan merupakan salah satu geopark yang sedang berkembang di Indonesia, yang menjadikannya pilihan yang tepat. Geopark Dieng adalah lokasi yang tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan konservasi karena menghadapi banyak masalah, seperti perbedaan antara kebutuhan konservasi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, tata kelola yang komprehensif diperlukan untuk Geopark Dieng karena berbagai daya tarik wisata alam dan budayanya. Hal ini menjadikan area ini sebagai studi kasus yang sempurna untuk memahami cara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama untuk mendukung pembangunan dan konservasi berkelanjutan. Dengan latar belakang ini, penelitian berkonsentrasi pada langkah-langkah kebijakan yang diterapkan dan bagaimana mereka berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.



Kawasan Geopark Dieng terletak pada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, oleh karena itu batas geopark tersebut ditentukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak kabupaten. Berdasarkan kesepakatan tersebut diputuskan bahwa kawasan geopark dibatasi oleh batas-batas administratif dan bukan oleh batas fisik atau batas fungsional lainnya. Pada Kabupaten Banjarnegara terdapat empat kecamatan yang menjadi lokasi deliniasi Geopark Dieng yaitu pada Kecamatan Batur, Kecamatan Pejawaran,

Kecamatan Pagentan, dan Kecamatan Wanayasa di mana dalam empat kecamatan tersebut mencakup 35 desa. Sementara itu, pada Kabupaten Wonosobo terdapat lima kecamatan yang menjadi lokasi deliniasi Geopark Dieng yaitu pada Kecamatan Garung, Kecamatan Kejajar, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Watumalang, dan Kecamatan Wonosobo, di mana kelima kecamatan tersebut mencakup 44 desa.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau kelompok yang terlibat langsung dalam pengelolaan Geopark Dieng, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, pengelola geopark, dan perusahaan swasta. Pemerintah daerah sangat penting karena mereka bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan kebijakan konservasi, serta bekerja sama dengan pihak lain untuk mendukung pengelolaan.

Karena masyarakat lokal merupakan bagian penting dari ekosistem geopark, mereka juga menjadi perhatian utama. Mereka tidak hanya dapat mempengaruhi kebijakan konservasi, tetapi mereka juga dapat mendukung atau menghalangi pelaksanaannya. Selain itu, penyelidikan dilakukan pada pengelola geopark dan bisnis wisata lokal untuk mengetahui kesulitan yang mereka hadapi dalam mengimbangi pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan.

Pada penelitian ini melibatkan :

- 1) Dinas ESDM Jawa Tengah (Aghnia)

- 2) Bappeda Jawa Tengah (Irfin, Indri)
- 3) Biro ISDA Jawa Tengah (Nanang)
- 4) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo (Hapiipi)
- 5) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara (Sri Utami)
- 6) Bappeda Kabupaten Wonosobo (Sri Wahyuni, Leny, Larashinta)
- 7) Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara (Indra)
- 8) Kepala Desa Dieng (Mardiyuwono)
- 9) Kepala Desa Sikunang (Tohar)
- 10) Kelurahan Kejajar (Mugito)
- 11) UMKM Purwaceng Albain (Faozan)
- 12) UMKM Kopi Lereng Bismo (Sabariyadi)
- 13) Dieng Geopark Youth Community (Abi Tholib)
- 14) PT. Geodipa Energi (Persero) Unit Dieng (Aan)

1.9.4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan tidak berangka, dan mencakup wawasan, pandangan, dan pengalaman yang diperoleh dari observasi lapangan, wawancara dengan informan, dan analisis laporan dan dokumen kebijakan yang relevan. Data kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial dan kebijakan.

Fakta di lapangan seperti keterlibatan masyarakat dalam kebijakan konservasi, jenis kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan masalah pelaksanaan kebijakan digambarkan dalam data deskriptif penelitian ini. Selain

itu, data ini menunjukkan bagaimana berbagai pihak memahami dan memaknai kebijakan konservasi di Geopark Dieng. Jenis data ini relevan untuk pendekatan kualitatif karena fokusnya pada penjelasan dan analisis naratif. Dengan menggunakan data deskriptif, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang kondisi dan dinamika yang terjadi di Geopark Dieng.

1.9.5. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer biasanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini penelitian menggunakan para informan termasuk pejabat pemerintah daerah, pengelola geopark, tokoh masyarakat, dan bisnis wisata lokal. Data diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data ini mendukung analisis data primer dari dokumen kebijakan, laporan tahunan, publikasi akademik, dan media online terkait Geopark Dieng.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari informan penting. Pertanyaannya disusun secara semi-terstruktur, yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali wawasan informan.

b. Observasi Langsung

Untuk memahami situasi lapangan aktual, peneliti melakukan observasi di lokasi. Peneliti melakukan ini untuk mempelajari praktik konservasi, interaksi antar pemangku kepentingan, dan kondisi infrastruktur.

c. Analisis Dokumen

Kebijakan pemerintah, laporan tahunan geopark, dan publikasi lain yang relevan termasuk dalam dokumen yang dianalisis.

1.9.7. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui teknik yang digunakan selanjutnya memerlukan analisis lebih lanjut untuk memperoleh hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis deskriptif digunakan oleh peneliti dan setelah mendapatkan jawaban dapat dijabarkan dengan baik dan jelas. Teknik analisis deskriptif yang digunakan adalah :

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah pengurangan hal-hal atau informasi yang tidak diperlukan dalam proses analisis data penelitian. Data yang telah dikumpulkan disederhanakan dan dipilih fakta yang kuat dan informasi yang paling meyakinkan. Dalam analisis ini, data yang tidak relevan akan tereliminasi. Hal ini bertujuan mempertegas pola analisis dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang relevan dengan penelitian.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyajikan data yang telah direduksi sebelumnya dalam bentuk narasi yang mudah dipahami. Peneliti akan mendeskripsikan rincian hasil temuan. Tujuannya agar peneliti mudah mengidentifikasi pola, hubungan antar data dan dapat memberikan deskripsi mengenai fenomena yang diteliti.

3) Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta mendeskripsikan data selanjutnya peneliti akan menyimpulkan seluruh data temuan. Tujuannya memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian dan memastikan hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

1.10. Sistematika Penelitian

BAB I

1.1. Latar Belakang

Menguraikan konteks penelitian yang meliputi pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam kebijakan konservasi Geopark Dieng, tantangan yang dihadapi, serta urgensi penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Mengidentifikasi pertanyaan penelitian utama

1.3. Tujuan Penelitian

Menjelaskan tujuan penelitian untuk menganalisis kolaborasi pemerintah, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kebijakan konservasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Membahas manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini, baik untuk pengembangan teori kolaborasi kebijakan maupun untuk praktik pengelolaan Geopark Dieng.

1.5. Penelitian Terdahulu

Mengulas berbagai literatur dan penelitian yang relevan, mengidentifikasi gap penelitian, serta menunjukkan kontribusi penelitian ini.

1.6. Landasan Teori

Memaparkan teori-teori yang digunakan, seperti teori kolaborasi kebijakan (Ansell & Gash) dan konsep *stakeholder* (Freeman, Mitchell, Agle, & Wood).

1.7. Kerangka Berpikir

Menyusun hubungan antara teori, fenomena, dan pendekatan penelitian sebagai dasar analisis.

1.8. Metode Penelitian

Menjelaskan pendekatan kualitatif deskriptif, lokasi penelitian, subjek penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB II

2.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Menguraikan potensi geologi, ekologi, dan budaya Geopark Dieng, serta tantangan pengelolaannya.

2.2. Gambaran Umum Kolaborasi Geopark Dieng

Menjelaskan kolaborasi yang telah terjalin dalam pengelolaan geopark

2.3. Gambaran Umum Kebijakan Geopark Dieng

Menjelaskan kebijakan konservasi yang diterapkan, kolaborasi yang terjalin, serta isu-isu yang dihadapi dalam pengelolaan geopark.

BAB III

3.1. Analisis kolaborasi pemerintah dalam kebijakan konservasi Geopark Dieng menggunakan teori Ansell & Gash.

3.2. Analisis hambatan kolaborasi yang dihadapi menggunakan konsep *stakeholder* dari sudut pandang kekuasaan dan kepentingan menurut Mitchell, Agle, dan Wood.

3.3. Analisis implikasi hambatan terhadap efektivitas kebijakan konservasi Geopark Dieng.

BAB IV

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN